



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya-upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke Indonesia**  
**melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)**  
**dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan**

Skripsi

Oleh

Fildza Malifa Setiabudi

2014330100

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Upaya-upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke Indonesia**  
**melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)**  
**dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan**

Skripsi

Oleh

Fildza Malifa Setiabudi

2014330100

Pembimbing

Dra. Sukawarsini Djelatik M.I.S., Ph.D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional




**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Fildza Malifa Setiabudi  
Nomor Pokok : 2014330100  
Judul : Upaya-upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 9 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Ratih Indraswari S.IP, M.A

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**  
Sukawarsini Djelantik Ph.D

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**  
Sapta Dwikardana Ph.D

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fildza Malifa Setiabudi

NPM : 2014330100

Jurusan Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke  
Indonesia dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan Melalui *Japan  
International Cooperation Agency (JICA)*

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 Desember 2017



Fildza Malifa Setiabudi

## ABSTRAK

Nama : Fildza Malifa Setiabudi

NPM : 2014330100

Judul : Upaya-Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan

---

Kerjasama antara Jepang dan Indonesia diawali dengan pemberian dana pampasan perang dan berbagai bantuan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan Piagam ODA, Jepang berusaha untuk melakukan kerjasama melalui pemberian bantuan ekonomi terhadap Indonesia. Maraknya ancaman lingkungan hidup di Indonesia dan sistem tata kelola yang belum memadai melatarbelakangi *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai lembaga bantuan luar negeri Jepang untuk melakukan berbagai kerjasama melalui proyek-proyek utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang ke Indonesia melalui JICA dalam bidang tata kelola lingkungan. Analisis dilakukan menggunakan teori diplomasi ekonomi, serta konsep kebijakan luar negeri untuk menjelaskan bagaimana aktifitas pengelolaan bantuan menjadi alat untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi Jepang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa JICA telah memberikan kontribusi berupa bantuan teknis dan anggaran bagi tercapainya tujuan diplomasi Jepang berdasarkan Piagam ODA. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan JICA di Indonesia dalam bidang lingkungan sudah sesuai dengan empat prinsip dasar implementasi ODA.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, JICA, ODA

## **ABSTRACT**

*Name* : Fildza Malifa Setiabudi

*NPM* : 2014330100

*Title* : *Japan's Economic Diplomacy Effort to Indonesia through Japan International Cooperation Agency (JICA) in the Field of Environmental Management*

---

*Cooperation between Japan and Indonesia has begun with the implementation of Japanese foreign aid supply and war repayment. In order to reach ODA's Charter goals, Japan seeks to cooperate primarily through economic assistance with Indonesia. The rise of environmental threats and the inadequate system of Indonesia's environmental management has become the background of JICA as a funding agency of Japan to conduct various cooperation through its mayor projects. This research aims to explain about how efforts are carried out by Japan to Indonesia through JICA in order to strengthen Indonesia's capacity in environmental management. Economic diplomacy theory and foreign policy concept are used to explain how the foreign aid activities become an instrument to achieve the goals of Japanese economic diplomacy. At the end of this research, the author concluded that JICA has contributed for achieving Japan's foreign policy based on ODA Charter by giving technical cooperation and official development aid. The activities undertaken by JICA in Indonesia in the field of environment management are in line with the four basic principles of ODA implementation.*

*Keywords: Economic diplomacy, JICA, ODA*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu skripsi yang berjudul “Upaya-Upaya Diplomasi Ekonomi Jepang ke Indonesia melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam Bidang Tata Kelola Lingkungan”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, bantuan, masukan, dan dukungan dari Ibu Sukawarsini Djelantik Ph.D selaku pembimbing. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun akan sangat bermanfaat. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, 18 Desember 2017

Penulis

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Untuk Allah SWT,*

Puji Syukur atas berbagai anugerah yang Engkau telah berikan, untuk berbagai karunia, cobaan, dan nikmatMu. Segala tantangan yang datang tidak akan saya bisa hadapi tanpa pertolonganMu, terimakasih atas berbagai rahmat yang menyertai saya untuk menyelesaikan ujian ini.

*Untuk Mama, Papa, dan Fadhlan,*

Tanpa bantuan mama dan papa saya tidak akan bisa sampai pada posisi ini. Terimakasih atas berbagai dukungan, kerja keras maupun doa yang menyertai sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan sarjana. Tanpa kasih sayang mama dan papa saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan ujian ini, sehingga berbagai kesuksesan yang saya capai seluruhnya saya persembahkan untuk kalian. Untuk Fadhlan terimakasih telah lahir ke dunia ini dan menjadi adik yang menuntut saya untuk terus menjadi contoh dan tauladan yang baik.

*Untuk Sukawarsini Djelantik Ph.D,*

Terimakasih atas berbagai bimbingan dan masukan selama proses kuliah maupun penyusunan skripsi ini. Berkat dorongan Mba Suke saya akhirnya berhasil membuktikan bahwa saya mampu menjalankan ujian ini. Terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

*Untuk Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional Unpar,*

Tanpa bantuan dan kerja keras mas dan mba semua saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan studi saya. Terimakasih atas ilmu-ilmu berharga yang dibagikan dan pastinya akan bermanfaat untuk kehidupan saya kedepannya. *I wish for your health and happiness.*



*Untuk Fahrizal Ahadisuryo, Silvia Larasati, dan Vidya Adhikrisna,*

Terimakasih saja sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan perasaan saya kepada kalian. Untuk berbagai dukungan moral dan emosional, untuk jutaan *chat* dan nada dering yang masuk, untuk semua doa yang dipanjatkan untuk saya. Terimakasih telah membuat saya bahagia setiap hari, *I can't imagine my life without you.*

*Untuk Karisa Aliya dan Shasta Kirana,*

*My friends from day one until very end of college days and hopefully forever.* Terimakasih atas segala pengalaman yang kita bagi bersama, dari mulai daftar ulang sampai daftar wisuda. Terimakasih telah bersedia untuk menangis bersama-sama, untuk wejangan-wejangan dan berbagai *deep talk* di mobil ataupun di kantin. *See you guys on top!*

*Untuk Tiara Grevillea,*

Lea, terimakasih banyak atas hari-hari menyenangkan selama hampir sepuluh tahun terakhir. Atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini, untuk selalu mengingatkan ketika lupa, untuk berbagai pertanyaan-pertanyaan konyol, dan juga untuk mimpi-mimpi yang akan terus kita kejar. *I'll meet you in New Castle, soon!*

*Untuk Nadia Ancilla dan Aliya Alifadrianti,*

Tanpa bantuan dan dukungan kalian berdua saya tidak akan sanggup untuk menangani berbagai cobaan selama proses penyusunan skripsi ini. Nasihat-nasihat yang diberikan telah banyak membantu saya untuk bangkit hingga akhirnya saya berhasil menyelesaikan ujian ini.

*Untuk Fajar Ramadhan,*

Terimakasih telah singgah dan membantu saya terbentur dan terbentuk. Untuk banyaknya *e-book* yang diberikan serta berbagai pelajaran yang tidak mungkin saya dapatkan dari orang lain.

*Untuk Farhan Yunas, Venti, Ayu Caesar, Amel, Upi, Indira, Haifa, Denna, Reizka (Ting-tong), Aldy, dan Damar,*

Terimakasih teman-teman atas pengalaman luar biasa selama dua tahun. Atas bantuan dan pengertiannya dalam menjalani berbagai kesibukan di Warta Himahi sembari menyusun skripsi. Kalian adalah tim terbaik yang pernah ada.

*Untuk Brigitte, Marika, dan Nuti,*

Terimakasih atas tuntutan dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saya, tanpa kalian saya tidak akan sanggup menghadapi berbagai ujian yang ada di depan. *I love you guys!*

*Untuk Giasinta Livia dan Regina,*

Terimakasih atas berbagai informasi dan dukungan moral yang telah kalian berikan. Untuk semangat agar kita dapat selesai bersama. Semoga kesuksesan terus menghampiri kalian semua.

*Untuk Ilham, Pandu, dan Rizka,*

Terimakasih karena telah menjadi garda terdepan dimulainya kehidupan saya di HI Unpar, tanpa dukungan kalian tidak mungkin saya mampu menyelesaikan studi saya. Untuk dukungan yang tiada henti agar saya terus mengejar cita-cita.

*Untuk Nadya Hanunnisa, Amanda Vania, Fahni, Fira, Epi, dan Vita,*

Terimakasih telah mau dan bersedia menjadi tempat bercerita di waktu suka maupun duka. Atas doa dan semangat yang kalian panjatkan selama saya menyusun skripsi ini.

*Untuk Bunda Septi dan Miss Iya,*

Kedua guruku yang berjasa besar dalam aspek kehidupanku, terimakasih atas berbagai ilmu, pengorbanan, dan doa-doa yang tidak pernah putus. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua.

Dan untuk semua orang yang pernah hadir dalam kehidupan saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu saya untuk terus semangat dan bersyukur.

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terimakasih.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Singkatan.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Perumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.6 Kajian Pustaka.....	11
1.7 Kerangka Pemikiran .....	16
1.8 Metode dan Teknik Penelitian .....	25
1.8.1 Metode Penelitian .....	25
1.8.2 Teknik Pengumpulan Data .....	26
1.9 Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II BENTUK-BENTUK BANTUAN BILATERAL JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) DALAM BIDANG LINGKUNGAN</b> .....	28
2.1 Profil JICA .....	29

2.1.1	Visi dan Misi JICA .....	31
2.1.2	Struktur Organisasi ODA dan JICA .....	32
2.2	Bentuk-bentuk Bantuan Bilateral JICA .....	33
2.2.1	Kerjasama Teknis .....	33
2.2.2	Bantuan Dana Pinjaman .....	36
2.2.3	Bantuan Hibah .....	39
2.3	Program Tematik JICA terkait Lingkungan.....	41
2.3.1	Konservasi Lingkungan .....	42
2.3.2	Manajemen Lingkungan .....	44
2.3.3	Pengelolaan Sumber Air .....	46
2.3.4	Pengurangan Risiko Bencana .....	48
2.4	Kebijakan Sosial dan Lingkungan JICA .....	50
2.4.1	Pertimbangan Lingkungan dan Sosial dalam Proyek .....	52
<b>BAB III PERKEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI JEPANG DENGAN INDONESIA .....</b>		<b>55</b>
3.1	Sejarah Kerjasama Ekonomi Jepang dan Indonesia.....	56
3.2	Kerjasama Ekonomi Jepang dengan Indonesia.....	60
3.2.1	Pengelolaan Bantuan Ekonomi Jepang terhadap Indonesia .....	62
3.3	Perkembangan Kerjasama Ekonomi Jepang melalui ODA .....	66
3.4	Pengelolaan Bantuan Luar Negeri Jepang dalam bidang Kerjasama Tata Kelola Lingkungan.....	69
3.4.1	Kondisi Umum Permasalahan Lingkungan Indonesia .....	73
<b>BAB IV UPAYA-UPAYA DIPLOMASI EKONOMI JEPANG KE INDONESIA MELALUI JICA DALAM BIDANG TATA KELOLA LINGKUNGAN.....</b>		<b>77</b>
4.1	Memberikan Bantuan Kerjasama Teknis .....	78
4.1.1	Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Ekosistem di Kawasan Konservasi .....	79

4.1.2 Meningkatkan Kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Alam .....	85
4.1.3 Pengelolaan Mitigasi Bencana Banjir Bandang Terpadu di Jember.. .....	89
4.2 Pemberian Bantuan Dana Pinjaman ODA .....	94
4.2.1 Perbaikan Sistem Pengendalian Banjir Perkotaan: Pengelolaan Sumber Daya Air dan Banjir Terpadu di Semarang .....	95
4.2.2 Mendukung Lingkungan Perkotaan: Pengelolaan Sampah Daerah Mamminasata, Sulawesi Selatan .....	98
4.2.3 Menanggulangi Dampak Bencana di Kawasan Gunung Merapi dan Hulu Sungai Progo.....	102
4.3 Pemberian Bantuan Hibah.....	106
4.3.1 Proyek Rekonstruksi Mendesak Stasiun Pompa Timur Pluit Jakarta.....	107
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>112</b>
Daftar Referensi .....	xiv

## Daftar Singkatan

3R	<i>Reduce, Reuse, dan Recycle</i>
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
AMF	<i>Asian Monetary Fund</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nation</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nation</i>
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CGI	<i>Consultative Group on Indonesia</i>
CGI	<i>Consultative Group on Indonesia</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
	<i>Development Assistance Committee</i>
DAC	Komite Bantuan Pembangunan
DAS	Daerah Aliran Sungai
EBD	<i>Environmental Broadly Defined</i>
ESD	<i>Environmental Strictly Defined Projects</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
JBIC	<i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JBIC	<i>Japan Bank for International Cooperation</i>
JETRO	<i>Japan External Trade Organization</i>

JETRO	<i>Japan External Trade Organization</i>
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JPP	<i>JICA Partnership Program</i>
KCCP	<i>Knowledge Co-creation Program</i>
LSM	Lembaga swadaya masyarakat
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i>
MITI	<i>The Ministry of International Trade and Industry</i> Kementerian Perdagangan dan Industri
MPA	Masyarakat Peduli Api
N	<i>Neutral</i>
OAU	<i>Organization of African Unity</i>
ODA	<i>Official Development Assistance</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OECF	<i>Overseas Economic Cooperation Fund</i>
OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
OTCA	<i>Overseas Technical Cooperation Agency</i>
PLAID	<i>Project-Level Aid</i>
PNB	Produk Nasional Bruto
PPK PLG Merapi	Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Lahar Gunung Merapi
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	Tempat Pengolahan Sampah
UNCED	<i>United Nations on Environment and Development</i>

UNISDR

*United Nations Office for Disaster Risk Management*

WTO

*World Trade Organization*



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Komik Ilmiah Mengenal Banjir Bandang di Indonesia .....	92
Gambar 4.2 Proyek pembangunan Waduk Jatibarang, di Semarang .....	98
Gambar 4.3 Aliran Banjir Lahar di Sungai Putih .....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kegiatan diplomasi ekonomi terutama aktifitas pengelolaan bantuan merupakan hal penting bagi hubungan bilateral maupun multilateral negara maju dan berkembang, terutama dalam menangani isu-isu yang belum bisa ditangani secara mandiri oleh negara berkembang. Maraknya perusahaan multi-nasional di negara berkembang termasuk Indonesia menjadi kendala bagi sistem manajemen lingkungan dimana dilema terjadi antara peningkatan pemasukan ekonomi dan juga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Tanpa adanya kerjasama internasional dalam menangani isu-isu yang mengancam kondisi sosio-ekonomi masyarakat seperti masalah lingkungan, iklim, kesehatan dan sebagainya maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius dan dapat merusak sistem baik yang sudah ada. Minimnya kemampuan negara berkembang dalam membentuk solusi bersama terhadap suatu isu dapat berdampak pada kesenjangan pembangunan yang semakin besar.

Isu lingkungan muncul dan menjadi agenda global karena didorong oleh beberapa faktor pendukung terutama karena meningkatnya kesadaran publik terhadap permasalahan degradasi lingkungan. Kemarau berkepanjangan, pemanasan global, perubahan iklim dan munculnya informasi-informasi penelitian

dari komunitas peneliti alam terkait kondisi lingkungan yang menurun menyebabkan isu ini dianggap menjadi permasalahan global.<sup>1</sup> Namun, minimnya keterlibatan dan kemampuan pemerintah negara berkembang dalam menjaga keberlanjutan alam masih minim dan menyebabkan isu ini menjadi perhatian dari negara-negara maju. Bantuan ekonomi sangat dibutuhkan bagi penyelesaian isu lingkungan karena belum mendapat perhatian signifikan dari pemerintah negara-negara dunia ketiga.

Permasalahan lingkungan menjadi agenda non-tradisional di kawasan Asia Tenggara yang perlu diselesaikan. Adanya krisis lingkungan hidup di Asia Tenggara tidak terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi.<sup>2</sup> Pergeseran ekonomi negara Barat dari *post-industrial* menuju pembangunan yang berkelanjutan tidak dijadikan contoh oleh negara-negara di Asia Tenggara. Berbagai bentuk resolusi global berkenaan lingkungan justru dianggap sebagai tindakan yang menghambat kemajuan negara berkembang supaya tidak menjadi kompetitor negara Barat di pasar internasional.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan di Asia Tenggara merupakan suatu permasalahan yang cukup besar contohnya masalah deforestasi yang marak terjadi. Vietnam sebagai negara ke empat terbesar dunia dalam bidang ekspor kayu justru memiliki masalah dalam menangani *illegal logging* dimana setengah dari ekspor tersebut

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS), 2014), 141.

<sup>2</sup> Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy* (Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), 271.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 271-273.

didapat dari penebangan kayu ilegal.<sup>4</sup> Persoalan kebakaran hutan juga menjadi perhatian internasional karena menyebabkan terjadinya *trans-boundary haze pollution*. Meskipun tidak hanya dialami oleh Indonesia akan tetapi dampak yang diberikan Indonesia terkait permasalahan ini lebih luas dibanding negara-negara lain, permasalahan kabut asap bukan menjadi hal baru dimana pada tahun 1997 kabut dari Indonesia telah menyelimuti hampir seluruh dari kawasan Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Semakin maraknya kerusakan lingkungan lintas negara menyebabkan berbagai usaha diplomasi dilakukan oleh komunitas internasional melalui berbagai pertemuan seperti *Rio Summit*, *Kuala Lumpur Declaration on Environment and Development*, *The Paris Agreement*, dan lain-lain sebagai usaha untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Akan tetapi, berbagai permasalahan muncul dalam pengaplikasian perjanjian tersebut salah satunya konflik yang berkaitan dengan bantuan luar negeri.<sup>6</sup> Contohnya, pada pelaksanaan *Kuala Lumpur Declaration on Environment and Development* yang diadakan pada tahun 1992, ada tekanan dari negara berkembang yang menuntut bantuan dalam bidang lingkungan dipisahkan dari *Official Development Assistance* (ODA).<sup>7</sup>

Bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan sangat dibutuhkan, mengingat setiap harinya ada jutaan hektar lahan hutan yang terbakar, dicuri kayu-kayunya,

---

<sup>4</sup> Donald E. Weatherbee, *op.cit.*,

<sup>5</sup> *Ibid.*, 281.

<sup>6</sup> Robert L Hicks, *Greening Aid?: Understanding the Environmental Impact of Development Assistance* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 2.

dan penurunan biodiversitas yang semakin cepat. Disisi lain ada lebih dari satu juta manusia yang meninggal karena polusi udara, air, dan masalah sanitasi.<sup>8</sup> Selain itu bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan juga penting agar negara-negara berkembang mau untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang mengangkat isu tersebut.<sup>9</sup>

Peningkatan kapasitas dalam manajemen lingkungan di Indonesia masih harus diperbaiki karena terdapat tumpang tindih hukum berkaitan dengan lingkungan dan kehutanan. Misalnya dalam kasus eksploitasi hutan jati yang bukan dilakukan oleh industri atau perusahaan tertentu melainkan oleh warga di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Tindakan para warga tersebut bukan sesuatu yang ilegal tapi mendapatkan judisifikasi dari pemerintah setempat yaitu berdasarkan Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik dimana kewenangan pemerintah daerah tersebut diambil atas dasar UU No. 22 tahun 1999 tentang kewenangan pemerintah daerah, sayangnya aturan yang ada tidak diikuti kebijakan mengenai pemulihan hutan itu sendiri.<sup>10</sup> Hal tersebut tentunya harus terus dikaji oleh pemerintah mengingat sumber daya alam sangatlah penting bagi kemajuan segala aspek kehidupan di Indonesia, asistensi dalam bidang penanganan dan pengelolaan lingkungan masih sangat dibutuhkan apalagi anggaran bagi isu lingkungan hidup terhitung kecil dimana pada tahun 2016 anggaran bagi penanganan lingkungan hidup hanya sebesar 0.8% dari Anggaran Belanja

---

<sup>8</sup> Robert L Hicks, *op.cit.*, 5

<sup>9</sup> *Ibid.*, 5-6

<sup>10</sup> Muhammad Ali Izhar, "Kerusakan Ekologis Hutan Jati di Kabupaten Muna (Potret Pemujaan Pendekatan Anthroposentris)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada* 11, no. 2 (November 2007): 153-160, <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10998/8239>.

Pemerintah Pusat.<sup>11</sup> Sehingga Indonesia masih membutuhkan bantuan luar negeri melalui kerjasama dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Pasca kekalahannya di Perang Dunia II, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat berawal sebagai penerima bantuan hingga menjadi pemberi bantuan luar negeri. Kepedulian terhadap isu lingkungan dilatarbelakangi oleh pengalaman Jepang yang telah beberapa kali mengalami permasalahan dalam bidang tersebut sebagai akibat dari eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam. Terjadinya *Minamata disease* dan *Niigata Minimata disease*<sup>12</sup> misalnya, disebabkan oleh adanya racun merkuri yang terdapat pada sumber makanan dan juga *Yokkaichi asthma*<sup>13</sup> yang disebabkan oleh polusi udara akibat industri besar-besaran di Jepang.<sup>14</sup> Akan tetapi permasalahan lingkungan yang terjadi di negaranya tidak berlangsung lama karena Jepang tidak lama kemudian membuat berbagai regulasi berkaitan dengan lingkungan dan

---

<sup>11</sup> Direktorat Penyusunan APBN, "Informasi APBN 2017: APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di tengah Ketidakpastian Global", (Jakarta: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2017), <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP2ajAn5LWAhVEv48KHXLBbUQFgg5MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenukeu.go.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbibfinal.pdf&usq=AFQjCNHRvYILXzXB85oig3VdCG52pcY3Dg>

<sup>12</sup> *Minamata disease* dan *Niigata Minimata disease* adalah sindrom kelainan neurologis yang disebabkan oleh keracunan merkuri. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Kota Minamata, Jepang disebabkan oleh pelepasan methylmercury di air sebagai limbah industri. "Minamata Disease, Sustainability, Boston University," Boston University, diakses Desember 2017, <http://www.bu.edu/sustainability/minamata-disease/>.

<sup>13</sup> *Yokkaichi Asthma* adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran udara di Jepang. Penyakit tersebut mewabah pada tahun 1960an hingga 1970an mengikuti perkembangan industri di Jepang "A Case of Severe Acute Exacerbation of Yokkaichi Asthma Treated with a Vibrating Mesh Nebulizer," PubMed Central (PMC), terakhir diubah 2016, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982920/>.

<sup>14</sup> Nicole Armitage, *From Crisis to Kyoto and Beyond : The Evolution of Environmental Concerns in Japanese Official Development Assistance* (Nagoya University, 2010), hlm 7.

pengendalian tingkat polusi. Selain itu titik penting bagi kemajuan manajemen lingkungan Jepang adalah dengan berkembangnya teknologi seperti *desulphurisation*<sup>15</sup> yang mengantarkan negaranya untuk menempati posisi sebagai negara terdepan dalam bidang reduksi polusi.<sup>16</sup> Ambisi Jepang sebagai pemberi bantuan luar negeri didukung oleh kemampuannya memperbaiki permasalahan lingkungan tanpa membuat kerugian dalam ekonomi domestik. Kondisi tersebut membuat Jepang berusaha untuk menjadi negara pendonor dibawah kerangka ODA. Peningkatan kapasitas dan fungsi lembaga peraturan dan pembaharuan teknologi pada akhirnya menjadi strategi Jepang dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang.

Kepentingan Jepang dalam bantuan luar negeri pada bidang lingkungan juga didukung oleh pernyataan dari *Medium-Term Policy* ODA Jepang tahun 2005 terkait pentingnya menangani permasalahan lingkungan.<sup>17</sup> Pernyataan tersebut selaras dengan kegiatan ekonomi Jepang terkait perdagangan bahan baku, salah satunya sebagai tujuan ekspor terbesar Indonesia terutama karet dan batu bara.<sup>18</sup> Hal tersebut menjadikan keberlangsungan dan keberlanjutan dari sumber daya alam Indonesia juga sangat penting bagi Jepang.

---

<sup>15</sup> Penggunaan teknologi *desulphurisasi* dimulai pada tahun 1975 untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jepang. United Nations, *Cities and Sustainable Development: Lessons and Experiences from Asia and the Pacific* (New York: United Nations, 2003), Google Books, 142.

<sup>16</sup> Armitage, *Op.cit.*, 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>18</sup> Kompas Media, "Jepang Tujuan Utama Ekspor Nonmigas RI - Kompas.com," KOMPAS.com, March 21, 2011, <http://ekonomi.kompas.com/read/2011/03/21/20514140/jepang.tujuan.utama.ekspor.nonmigas.ri>.

## 1.2 Identifikasi Masalah

*Japan International Cooperation Agency (JICA)* merupakan organisasi kerjasama Jepang dalam bidang bantuan yang pada awalnya bertugas untuk memberikan bantuan bentuk transfer teknologi dan pengetahuan yang berskala internasional khususnya untuk negara-negara berkembang.<sup>19</sup> JICA didirikan pada tahun 1974 berfungsi sebagai lembaga di bawah pemerintah Jepang yang bertanggung jawab untuk dalam menangani kerjasama bilateral dibawah ODA.<sup>20</sup>

Berkembangnya perekonomian dan status internasional membuat Jepang memperluas skala dan bentuk bantuan luar negeri tidak hanya dalam bentuk dana hibah tapi juga mengupayakan peningkatan status ODA sebagai sumber donor.<sup>21</sup> Kebijakan pembangunan tersebut terbagi menjadi dua bidang bantuan yaitu bantuan bilateral dan bantuan multilateral.<sup>22</sup> Untuk memenuhi kepentingan negara maka JICA yang merupakan alat dalam memberikan bantuan bilateral ke negara-negara berkembang dibawah ODA melakukan beberapa bentuk bantuan yang meliputi kerjasama teknik, bantuan pinjaman ODA Jepang dan Bantuan Hibah.

Hadirnya JICA di Indonesia bertujuan untuk membantu pembangunan negara berkembang dalam berbagai bidang. Selama hampir setengah abad JICA sebagai instrumen bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan terbesar bagi Indonesia disamping *World Bank* dan Belanda. Sejak tahun 1980an Indonesia

---

<sup>19</sup> "Japan International Cooperation Agency (JICA)," MIT - Massachusetts Institute of Technology, diakses Februari, 2017, <http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/resources/organizations/JICA.html>.

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> *History of Japan's Assistance to Developing Countries (1945-1999)*. Ministry of Foreign Affairs of Japan, diakses Oktober 2017, <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref8.html>.

<sup>22</sup> Ibid.,



termasuk dalam 10 negara penerima bantuan luar negeri terbesar dan salah satu pemberi bantuan yang masuk adalah Jepang melalui ODA dan juga JICA.<sup>23</sup> Adanya bantuan luar negeri JICA ke Indonesia yang berkelanjutan selama lebih dari tiga puluh tahun, menandakan adanya hubungan bilateral yang baik antara keduanya.

Tahun 1992 menjadi titik penting bagi perubahan perhatian Jepang dalam bidang lingkungan. Pada tahun tersebut Jepang menambah dana bantuan luar negeri sebesar 1% dari Produk Nasional Bruto (PNB) melebihi tuntutan dalam pembahasan di *Earth Summit* dalam rangka bantuan di bidang lingkungan.<sup>24</sup> Hal tersebut dilakukan karena adanya keyakinan bahwa sumber kekayaan negara diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sudah menjadi kewajiban Jepang untuk berperan penting bagi pembangunan sekaligus lingkungan.<sup>25</sup> Dapat dilihat bahwa isu lingkungan dan ekonomi menjadi kepentingan bagi Jepang, sehingga ODA sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Jepang menjadikan permasalahan tersebut sebagai agenda diplomasi ekonomi.

Di dalam Piagam ODA tahun 2003 ditekankan bahwa tujuan dari bantuan pembangunan Jepang adalah untuk berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan masyarakat internasional dengan memastikan kemakmuran negaranya melalui kerjasama ekonomi. Strategi yang digunakan dalam rangka mencapai target tersebut adalah dengan memperkenalkan negara berkembang terhadap konsep *self-help* yang dianut Jepang, menjamin ditegakannya keadilan

---

<sup>23</sup> Nicole Armitage, *Op.Cit.*, 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*,

terhadap berbagai aspek termasuk masyarakat dan lingkungan hidupnya, memberikan bantuan yang didasarkan pada pengalaman Jepang, serta menjamin keamanan manusia.<sup>26</sup> Dalam rangka menegaskan posisi Jepang mengenai konsep keamanan manusia maka pada tahun 2005 dibentuk Kebijakan ODA Jangka Menengah yang disusun untuk menggambarkan posisi, dan tindakan positif Jepang dalam menangani permasalahan global termasuk lingkungan.<sup>27</sup>

Sebagai salah satu alat diplomasi ekonomi bagi Jepang maka ODA memfokuskan kegiatannya dalam bidang bantuan luar negeri bilateral melalui JICA. Isu pembangunan sangat berkaitan dengan ekonomi, sedangkan potensi sumber daya alam merupakan roda bagi berjalannya perekonomian terutama sehingga keberlangsungan lingkungan hidup harus dijaga. Sebagai lembaga yang menjadi alat pemenuhan kebijakan luar negeri melalui kegiatan diplomasi ekonomi kerjasama JICA di Indonesia melibatkan isu lingkungan yang mungkin dilihat Jepang memiliki peluang dalam rangka mencapai tujuan ODA.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Periode penelitian dalam penulisan ini dibatasi antara tahun 2008 sampai 2015 mengingat pada Bulan Oktober 2008 terdapat pembaharuan terkait fungsi dan tugas JICA.<sup>28</sup> Sedangkan tahun 2015 menandakan adanya perubahan pada

---

<sup>26</sup> Japan's Official Development Assistance Charter, (Jepang: Ministry of Foreign Affairs Economic Co-operation Bureau, 2003), <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0308.pdf>.

<sup>27</sup> Japan's Medium-Term Policy on Official Development Assistance, (Jepang: Ministry of Foreign Affairs Economic Co-operation Bureau, 2003), <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/mid-term/policy.pdf>

<sup>28</sup> Armitage, *op.cit*, 9

Piagam ODA dimana terdapat perubahan fokus kebijakan luar negeri dalam pengelolaan bantuan di bidang lingkungan. Aspek yang dilihat yaitu diplomasi ekonomi yang dilakukan Jepang melalui JICA dengan membatasi pada proyek-proyek besar yang dilakukan di Indonesia dalam bentuk bantuan teknis, pinjaman ODA, maupun bantuan hibah. Bidang lingkungan dalam penelitian ini melingkupi program tematik JICA dalam manajemen lingkungan, konservasi alam, penyediaan sumber air, dan mitigasi bencana alam.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang melalui JICA di Indonesia dalam bidang tata kelola lingkungan dilakukan. Pembahasan difokuskan kepada JICA sebagai instrumen kerjasama bilateral ODA yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Jepang.

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia melalui JICA dalam bidang lingkungan. Selain itu untuk melihat bagaimana JICA sebagai lembaga pengelolaan bantuan Jepang menjadi instrumen kebijakan luar negeri melalui aktifitas diplomasi pada tahun 2008 hingga 2015. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hubungan internasional khususnya dalam aspek bantuan luar negeri dan diplomasi ekonomi.

## 1.6 Kajian Pustaka

Penelitian mengenai diplomasi ekonomi dalam bentuk bantuan luar negeri oleh Jepang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian-penelitian tersebut beberapa penulis mencari tahu faktor pendorong Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri dengan menjadikan negara berkembang sebagai studi kasus.

Tulisan mengenai bantuan luar negeri Jepang disusun oleh Kweku Ampiah peneliti yang memfokuskan studi politik negara Jepang. Dalam tulisannya yang berjudul *Japanese Aid To Tanzania: A Study Of The Political Marketing Of Japan In Africa* pada tahun 1996 Ampiah mengidentifikasikan bagaimana bantuan luar negeri bisa dijadikan sebagai instrumen politik, terutama bantuan yang diberikan Jepang kepada Tanzania.<sup>29</sup> Ampiah ingin menganalisis mengenai bantuan luar negeri Jepang dan negara penerima berkaitan kepentingan ekonomi Jepang.

Ampiah berargumen berdasarkan pernyataan dari Kementrian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Jepang terkait bantuan ekonomi. Menurut pernyataan tersebut, negara yang tidak menjanjikan atau sedikit memberi keuntungan ekonomi terhadap Jepang cenderung tidak akan mendapatkan pinjaman dari Jepang. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ampiah menunjukkan bahwa bantuan luar negeri Jepang ke Tanzania merupakan bantuan

---

<sup>29</sup> K. Ampiah, "Japanese Aid To Tanzania: A Study Of The Political Marketing Of Japan In Africa," *African Affairs* 95, no. 378 (1996): 107, doi:10.1093/oxfordjournals.afraf.a007693.

kemanusiaan bukan karena adanya keuntungan ekonomi dari Tanzania kepada Jepang.<sup>30</sup>

Selanjutnya Ampiah mengidentifikasi determinan yang mempengaruhi bantuan luar negeri Jepang ke Tanzania diantaranya, yaitu adanya kepercayaan Jepang terhadap politik di Tanzania terutama dalam penanganan kolonialisme dan masalah kaum minoritas.<sup>31</sup> Adanya tekanan dari negara-negara donor lainnya terutama *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*<sup>32</sup> terhadap Jepang mengenai bantuan luar negeri ke Afrika.<sup>33</sup> Selain itu juga didorong oleh adanya kepentingan politik terkait isu perdagangan dan juga ancaman hubungan diplomasi dengan Afrika Selatan sehingga Tanzania dianggap dapat membantu dalam menghilangkan asumsi buruk dan kritik Negara Dunia Ketiga maupun *Organization of African Unity (OAU)* terhadap Jepang.<sup>34</sup> Penelitian Ampiah tidak secara khusus membahas mengenai kondisi regional terutama politik di Afrika. Kedua, Ampiah tidak menunjukkan bagaimana kondisi domestik Jepang pada saat melakukan bantuan luar negeri ke Tanzania, yang mungkin dapat mempengaruhi pilihan Jepang untuk memilih Tanzania sebagai negara penerima bantuan luar negeri.

Penelitian lain berkaitan dengan bantuan luar negeri Jepang ditulis oleh Nicole Armitage dalam artikel yang disusun di Sekolah Pascasarjana Universitas

---

<sup>30</sup> Ampiah, *op.cit.*, 112

<sup>31</sup> Ibid.,114-115

<sup>32</sup> OECD adalah kerjasama Ekonomi dan Pembangunan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1960 untuk merangsang kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia. "About the OECD," OECD.org - OECD, diakses 18 Desember, 2017, <http://www.oecd.org/about/>.

<sup>33</sup> Ibid.,120

<sup>34</sup> Ibid.,

Nagoya Jepang berjudul *From Crisis to Kyoto and Beyond: The Evolution of Environmental Concerns in Japanese Official Development Assistance* pada tahun 2008.<sup>35</sup> Armitage memfokuskan penelitiannya pada bidang lingkungan. Ia mengatakan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang didorong oleh adanya keuntungan bersama yang dapat diterima baik oleh pendonor ataupun penerima termasuk dalam bidang bisnis, sumber daya alam, kepentingan geopolitik, dan kebijakan luar negeri, hal tersebut dibuktikan dengan besarnya investasi Jepang di negara-negara penerima bantuan luar negeri terutama di Asia.<sup>36</sup> Akan tetapi, Armitage juga menggaris bawahi kecenderungan Jepang untuk memberikan bantuan lingkungan dalam bentuk transfer teknologi dan infrastruktur. Hal tersebut didasarkan pada latar belakang Jepang ketika menghadapi serangkaian permasalahan lingkungan domestik dimana Jepang menanggapi dengan menitik beratkan kepada perkembangan teknologi.<sup>37</sup> Pengalaman telah mengajarkan Jepang tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakatnya.<sup>38</sup>

Hubungan baik dengan negara-negara di Asia menurut Armitage mendorong besarnya pengaruh Jepang di kawasan tersebut, dimana dapat dilihat dari banyaknya diskusi dan bantuan terkait isu-isu lingkungan.<sup>39</sup> Armitage juga menyatakan bahwa posisi ODA yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan bahwa kegiatan bantuan luar negeri yang dilakukan oleh

---

<sup>35</sup> Ampiah, *op.cit*

<sup>36</sup> Armitage, *op.cit.*, 34.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 7

<sup>38</sup> *Ibid.*, 38

<sup>39</sup> *Ibid.*, 38

Jepang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri.<sup>40</sup> Sebaliknya dengan Ampiah tulisan Armitage lebih menunjukkan alasan domestik Jepang melakukan bantuan luar negeri terhadap negara berkembang dan belum berkembang. Armitage lebih fokus dalam bidang lingkungan dan melakukan pembagian waktu dalam meneliti alasan utama Jepang dalam melakukan bantuan luar negeri.

Sumber lain merupakan tulisan dari David Potter yang berjudul *Assesing Japan's Environmental Aid Policy* pada tahun 1994. Potter menjelaskan awal Jepang memberikan bantuan luar negeri atas dasar kesadaran akan pentingnya isu lingkungan dan bagaimana kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang mempengaruhi penanganan Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan.<sup>41</sup> Menurut Potter pada awalnya Jepang masih menemukan berbagai masalah dalam memberikan bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan hal ini disebabkan karena Jepang merupakan salah satu negara yang pertama memberikan bantuan luar negeri dalam bidang tersebut.<sup>42</sup> Masalah-masalah yang muncul meliputi terbatasnya penerapan peraturan dan juga perbedaan pandangan negara-negara berkembang sebagai penerima bantuan dalam menyikapi isu-isu lingkungan.<sup>43</sup> Sejak awal Jepang telah memberikan dana yang terhitung besar namun sayangnya bantuan-bantuan tersebut tidak bersifat

---

<sup>40</sup> Armitage, *op.cit.*, 38

<sup>41</sup> David Potter, "Assesing Japan's Environmental Aid Policy," *Pacific Affairs* 67, no. 2 (1994): 200, <https://www.jstor.org/stable/2759417>.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 200

<sup>43</sup> *Ibid.*,

berkelanjutan, yang juga disebabkan oleh minimnya kesadaran negara-negara berkembang akan pentingnya masalah keberlanjutan lingkungan.<sup>44</sup>

Ketiga penelitian diatas berargumen bahwa bantuan luar negeri merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang memiliki muatan politik dalam praktiknya. Terdapat juga beberapa perbedaan yang mendasar antara Ampiah dan Armitage terkait dengan faktor yang mendorong dan menentukan dilakukannya bantuan luar negeri oleh Jepang selain karena perbedaan fokus tahun penulisan dan sistem politik internasional saat itu, perbedaan mendasar juga disebabkan pilihan bidang fokus yang berbeda dimana Ampiah melihat secara umum faktor pendorong Jepang melakukan bantuan kemanusiaan di Tanzania, dan Armitage menganalisa penyebab Jepang memberikan bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan. Dari pemaparan tersebut penulis menganalisa bagaimana suatu kerjasama dapat didorong oleh kebutuhan dan situasi tertentu, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai kebijakan luar negeri baik Ampiah, Armitage maupun Potter tidak secara jelas menjelaskan bagaimana faktor-faktor pendorong tersebut menjadi penentu bagi bentuk-bentuk upaya bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang.

Tulisan-tulisan tersebut difokuskan kepada faktor pendorong dan juga bantuan luar negeri sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi bantuan luar negeri Jepang ke Indonesia dalam skema diplomasi ekonomi melalui JICA, serta bentuk-bentuk bantuan yang telah diberikan oleh JICA.

---

<sup>44</sup> David Potter, *op.cit.*, 215



## 1.7 Kerangka Pemikiran

Kebijakan luar negeri diartikan sebagai keseluruhan dari kebijakan negara dalam melakukan interaksi terhadap lingkungan diluar wilayahnya termasuk seluruh isu yang yang menggambarkan perhatian pembuatan keputusan.<sup>45</sup> Kebijakan luar negeri umumnya dipengaruhi oleh keadaan domestik seperti struktur maupun dinamika politik yang terjadi dalam internal negara maupun dipengaruhi struktur dan fenomena global.<sup>46</sup> Sehingga bisa dikatakan kebijakan luar negeri bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan dalam rangka menguntungkan negara dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu.

*Power* memiliki kaitan erat dengan kebijakan luar negeri, yaitu sebagai alat untuk mempengaruhi negara lain. Penggunaan *power* dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan yang diinginkan oleh negara melalui kebijakan luar negeri.<sup>47</sup> Penggunaan *power* sebagai alat untuk mencapai kepentingan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *direct action* atau *coercion* yang berarti menggunakan instrumen *hard power* seperti militer; dan *indirect action* atau *persuasion* yaitu penggunaan *soft power* seperti melalui hubungan ekonomi dalam rangka mencapai kebijakan luar negeri.<sup>48</sup> Sebagai negara yang tidak secara langsung memiliki kekuatan militer maka salah satu alat *soft power* yang dapat digunakan Jepang adalah melalui bidang ekonomi.

---

<sup>45</sup> Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (2012), hlm 5.

<sup>46</sup> Ibid.,

<sup>47</sup> Gideon Rose, "Review: Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy," *World Politics* 51, no. 1 (October 1998): 151, <http://www.jstor.org/stable/25054068>.

<sup>48</sup> C. Alden, "Power, Capability, and instruments," *Foreign Policy Analysis*, (2011): 18-21 [http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme\\_resources/lse/lse\\_pdf/subject\\_guides/ir2137\\_ch1-3.pdf](http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/ir2137_ch1-3.pdf).

Semakin meningkatnya hubungan ekonomi antar negara terutama sejak dimulainya era globalisasi menjadi titik penting dalam hubungan saling keterkaitan ekonomi dunia. Bagi negara-negara yang telah bergantung pada perdagangan internasional, agenda ekonomi menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.<sup>49</sup> Breuning melihat bagaimana Belanda dan Belgia sebagai negara yang relatif kecil dan minim sumber daya alam dapat memiliki tingkat perekonomian yang dapat dibilang maju, sehingga ia menyimpulkan bahwa keterbukaan ekonomi menjadi salah satu alasan yang logis untuk fokus terhadap hubungan ekonomi eksternal negaranya meskipun hal tersebut tidak menjamin.<sup>50</sup>

Ekonomi dan perdagangan tidak bisa dipungkiri merupakan agenda utama bagi kebijakan luar negeri karena adanya kebergantungan yang kompleks dikarenakan perekonomian dunia yang semakin terbuka. Kebijakan luar negeri yang dibuat harus sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada dalam sistem internasional sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kini bukan hanya kebijakan luar negeri yang menentukan perekonomian suatu negara tapi situasi dan hubungan ekonomi dengan negara lain juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Salah satu instrumen dalam mencapai kebijakan luar negeri termasuk dalam bidang hubungan ekonomi yaitu melalui kegiatan diplomasi.

Pada perkembangannya diplomasi tidak lagi berfokus kepada isu-isu tradisional dimana implementasi kebijakan luar negeri berfokus pada bidang militer dan keamanan. Pada mulanya diplomasi dilakukan untuk mempertahankan

---

<sup>49</sup> Breuning, *op.cit.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*, 115

kekuasaan terhadap negara-negara yang lebih lemah dan atau mempertahankan keseimbangan kekuatan dengan negara-negara yang memiliki *power* yang sama dalam segi kekuatan dan pengaruhnya.<sup>51</sup> Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu didukung oleh meluasnya pembahasan isu-isu diplomasi yang semakin berkembang dimana batasan geografis tidak lagi menjadi patokan utama dalam kebijakan luar negeri dan praktik diplomasi.<sup>52</sup> Sehingga aktor-aktor yang berkepentingan tidaklah hanya negara, dimana aktor-aktor lain muncul dalam rangka memenuhi kepentingannya diikuti oleh semakin meluasnya isu-isu global yang berkembang.

Banyaknya isu-isu yang melibatkan berbagai aktor internasional menjadikan bidang ekonomi menjadi pembahasan krusial dalam proses kebijakan luar negeri. Kegiatan ekonomi internasional yang semakin pelik menyebabkan terjadinya pergeseran dari isu-isu konvensional yang membahas mengenai isu-isu politik dan militer menjadi lebih luas dengan aktor yang juga lebih banyak terlibat di dalamnya. Kegiatan ekonomi dan politik kini berjalan bersamaan, dan menjadi agenda kebijakan luar negeri dimana dalam berdiplomasi maupun negosiasinya setiap negara kerap kali memunculkan kepentingan ekonomi namun secara bersamaan juga mempertimbangkan dimensi politik negaranya atau dengan kata lain ekonomi dapat digunakan sebagai alat penggerak politik.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara teori & praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 228.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 57-59.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 229.

Diplomasi ekonomi merupakan alat untuk mencapai kepentingan yang sesuai dengan kebijakan luar negeri.<sup>54</sup> Kegiatan diplomasi ekonomi dilakukan berdasarkan empat pilar kegiatan ekonomi yaitu pertama promosi perdagangan, sebagai fokus utama tapi tidak terbatas pada penanganan kegiatan untuk meningkatkan ekspor. Kedua, promosi peluang investasi, terutama memfokuskan pada investasi dalam negeri. Ketiga, menarik masuknya teknologi yang memadai, termasuk teknologi panen, dan keempat yaitu pengelolaan bantuan ekonomi, yang perlu untuk negara-negara berkembang pada umumnya sebagai penerima dan sebagai donor dalam kasus negara maju.<sup>55</sup> Oleh karena itu, diplomasi ekonomi merupakan alat untuk mendapatkan keuntungan melalui aktifitas ekonomi dengan negara lain termasuk juga dalam memberikan bantuan ekonomi terhadap negara berkembang. Diplomasi ekonomi juga dijadikan sebagai alat *soft power* bagi kebijakan luar negeri suatu negara untuk menciptakan atau meningkatkan pengaruh suatu negara terhadap negara lain.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mempererat hubungan politik maupun budaya adalah melalui diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral adalah upaya negosiasi yang melibatkan dua negara. Upaya diplomasi bilateral dianggap memiliki peluang berhasil yang lebih besar karena lebih mudah untuk mencapai kompromi dibandingkan dengan diplomasi multilateral yang melibatkan banyak negara dan kepentingan.<sup>56</sup> Penerapan diplomasi bilateral dilakukan melalui institusi-institusi hubungan luar negeri seperti kedutaan, pos-pos

---

<sup>54</sup> Djelantik, *op.cit.*, 229

<sup>55</sup> *Ibid.*, 230.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 86

konsuler, kantor perwakilan yang seluruhnya melakukan moda diplomasi.<sup>57</sup> Selain melalui kantor-kantor diplomatik, diplomasi juga bisa dilakukan oleh pemerintah dengan fungsi non-diplomatik seperti kantor perdagangan dan pariwisata, maupun melibatkan masyarakat secara umum.

Akan tetapi semakin berkembangnya perekonomian menyebabkan adanya masalah lain yang timbul menyertainya, yaitu kerusakan lingkungan terutama didukung dengan semakin berkembangnya globalisasi. Menurut Andrew Hurrell terdapat hubungan kompleks antara permasalahan lingkungan dengan ekonomi global di satu sisi diketahui bahwa degradasi lingkungan disebabkan oleh semakin berkembangnya negara-negara industri yang menguntungkan bagi negara berkembang tapi menyebabkan semakin berkurangnya sumber daya alam dan energi. Selain kerusakan alam, menurut Laporan Brundtland tahun 1992 di pertemuan *United Nations on Environment and Development* (UNCED) menyatakan bahwa semakin berkembangnya jumlah industri justru dapat menyebabkan terjadinya tekanan sosial dan bisa meningkatkan jumlah kemiskinan sehingga diperlukan adanya suatu pemahaman baru mengenai pembangunan yang berkelanjutan dimana perkembangan ekonomi harus dibarengi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial.<sup>58</sup> Dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut maka Hurrell menyatakan bahwa permasalahan ekologi dan politik internasional tidak bisa dipisahkan karena pada dasarnya pihak utama yang mengatur perputaran ekonomi dunia adalah lembaga-lembaga internasional seperti

---

<sup>57</sup> Djelantik, *op.cit.*, 102

<sup>58</sup> Benedict Kingsbury dan Andrew Hurrell, *The International Politics of the Environment*. (Oxford: Oxford University, 1994), Microsoft Reader e-book, 3.

World Bank, *World Trade Organization* (WTO), OECD, dan *Group of 20* (G20), serta organisasi terkait lainnya dimana peran negara dalam membuat suatu keputusan adalah sangat krusial.<sup>59</sup>

Kehadiran negara sebagai aktor utama adalah sangat penting dalam proses pembuatan keputusan terkait ekonomi dan lingkungan karena negara memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk membuat keputusan yang didasarkan pada kondisi domestik sekaligus harus membuat kesepakatan bersama yang dapat menguntungkan bagi seluruh anggota.<sup>60</sup> Bagaimanapun terdapat kendala bagi tercapainya kesepakatan kolektif terutama terkait lingkungan karena setiap negara memiliki tujuan dan perhatiannya masing-masing terutama berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan stabilitas politik. Sehingga dalam menangani permasalahan lingkungan selain negara peran dari aktor-aktor non tradisional juga sangat dibutuhkan.

Kate O'Neill juga menekankan peran negara sebagai aktor dalam politik lingkungan internasional terutama berdasarkan tingkat perekonomiannya. O'Neill melihat bahwa dalam sistem internasional negara dan pemerintah adalah satu-satunya aktor yang memiliki legitimasi dalam pembuatan keputusan termasuk dalam regulasi terkait lingkungan, dalam hal ini negara berusaha mencapai tujuan bersama dengan berupaya mencapai kepentingan nasional sehingga negara juga memiliki peran penting dalam menentukan kondisi politik lingkungan

---

<sup>59</sup> Benedict Kingsbury dan Andrew Hurrell, *op.cit.*,

<sup>60</sup> *Ibid.*, 4-5

internasional.<sup>61</sup> Selain itu O'Neill juga menyatakan bahwa baik negara Utara maupun Selatan memiliki peranan yang sama dalam menjaga lingkungan global karena bagaimanapun terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dan pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, negara-negara selatan juga memiliki peran penting dalam rangka menangani masalah lingkungan karena separuh populasi dunia, dan sebagian besar pertumbuhan industri berada di negara berkembang, sehingga partisipasinya sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan global. Disamping itu, permasalahan lingkungan juga banyak terjadi di negara berkembang diantaranya masalah keanekaragaman hayati, bencana alam, polusi, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Aktor lain yang memiliki peran penting dalam pembahasan lingkungan di lingkup politik internasional adalah organisasi antarpemerintah. Organisasi multilateral berfungsi untuk menyediakan forum bagi pengambilan keputusan bersama, dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menerapkan resolusi secara global.<sup>63</sup> Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memainkan peran penting dalam menyoroiti masalah lingkungan global karena dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai isu terkait melalui kegiatan aktivismenya.<sup>64</sup> Selain itu perusahaan multinasional dan

---

<sup>61</sup> Kate O'Neill, "Actors in international environmental politics," in *The Environment and International Relations* (Cambridge: Cambridge university press, 2017), Microsoft reader e-book., 48-49

<sup>62</sup> Ibid.,

<sup>63</sup> Ibid.,

<sup>64</sup> Ibid., 73-74

swasta juga dianggap mulai terlibat dalam mendukung penanganan masalah lingkungan melalui penerapan manajemen produksi yang ramah lingkungan.<sup>65</sup>

Hubungan antara ekonomi dan lingkungan pada dasarnya merupakan isu yang saling berkaitan, dan tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Dalam kegiatan kebijakan luar negeri maka yang terlibat di dalamnya tidak hanya pemerintah namun juga aspek-aspek terutama masyarakat, lembaga swadaya, maupun organisasi bisnis. Hal tersebut sejalan juga dengan proses bantuan luar negeri yang melibatkan banyak jalur dari mulai pemerintah, aktivisme, warga sipil, maupun organisasi bisnis sehingga hubungan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan.

Dalam bukunya Robert L Hicks membagi bantuan luar negeri dalam beberapa level atau yang dinamakan *Project-Level Aid* (PLAID) berdasarkan pembagian tersebut seluruh kegiatan bantuan luar negeri dibagi ke dalam tiga kategori utama, yang pertama *Environmental Strictly Defined Projects* (ESD) yaitu kegiatan yang diharapkan akan memberikan efek atau dampak langsung terhadap lingkungan seperti akses kepada air bersih, reforestasi, reduksi karbondioksida, dll. Kedua, *Environmental Broadly Defined* (EBD) yaitu kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap lingkungan tapi akan berdampak dalam jangka panjang seperti pembangunan bendungan, transportasi darat dan laut, dll. Dan ketiga, *Neutral* (N) adalah kegiatan yang bisa tidak memiliki dampak secara langsung namun hasilnya bisa berdampak positif atau negatif, terdapat empat

---

<sup>65</sup> Kate O'Neill, *op.cit.*, 62



bentuk dari kategori ini yaitu ekonomi, bantuan kesehatan dan edukasi, telekomunikasi dan komunikasi, dan penyediaan bantuan pada bencana alam.<sup>66</sup>

Dalam membagi kegiatan lingkungan ESD dan EBD terdapat dua dimensi yaitu dimensi hijau dan coklat. Dimensi hijau berarti kegiatan yang disusun untuk menangani masalah global dan regional seperti kabut asap lintas negara, hilangnya biodiversitas, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Sedangkan dimensi coklat melingkupi kegiatan-kegiatan yang menangani permasalahan lokal atau domestik seperti longsor, tata kelola sumber daya alam, akses terhadap air bersih, dan lain sebagainya.<sup>67</sup> Klasifikasi-klasifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bentuk-bentuk bantuan lingkungan apa saja yang telah dilakukan Jepang di Indonesia selama delapan tahun terakhir.

Hicks juga memberikan beberapa hipotesis yang didukung oleh beberapa penemuan statistik mengenai alasan mengapa suatu negara menerima bantuan dan mendapat perhatian yang lebih dalam bidang lingkungan, faktor-faktor tersebut diantaranya signifikansi lingkungan global, keadaan kerusakan domestik, signifikansi lingkungan regional, partisipasi dalam perjanjian lingkungan internasional, transparansi negara dalam bidang lingkungan, kekuatan atau stabilitas institusi, kebijakan ekonomi, demokrasi, hubungan kolonial, loyalitas politik (di dalam PBB), kebutuhan negara penerima bantuan luar negeri, serta hubungan dagang antara kedua negara.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Hicks, *op.cit.*, 23.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 24

<sup>68</sup> *Ibid.*, 88

Bagi Hicks faktor-faktor diatas meskipun terkait dengan lingkungan bisa jadi merupakan bagian dari isu-isu *high politics* mengingat komponen tersebut tidak terbatas terhadap kondisi lingkungan suatu negara. Aspek-aspek yang telah disebutkan oleh Hicks nantinya akan dikaitkan dengan bagaimana kedekatan antara Indonesia dan Jepang dan bagaimana hubungan keduanya bisa mejadi latar belakang Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan tidak terbatas karena kondisi lingkungan yang ada di Indonesia.

## **1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.8.1 Metode Penelitian**

Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif. Metode penelitian kualitatif yaitu melalui analisa data dan transkrip, bukan merupakan penelitian yang didorong oleh data statistik.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, metode kualitatif menekankan kepada pemahaman terhadap suatu fenomena dibandingkan dengan memprediksi fenomena.<sup>70</sup> Analisis dilakukan dengan mengumpulkan berbagai konten data untuk selanjutnya dianalisis dengan munggunakan suatu konsep untuk menentukan hubungan antar variabel penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pengamatan yang rinci terhadap suatu fenomena, dengan observasi ilmiah yang tepat.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Scholar Commons University of South Florida (USF) Tampa Library, diakses 26 Februari 2017, [http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa\\_textbooks](http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks).

<sup>70</sup> Ibid.,

<sup>71</sup> Ibid.,

### **1.8.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi pustaka. Sumber diambil dari beberapa dokumen seperti artikel atau bab dari buku, jurnal ilmiah, internet, laporan tahunan, referensi-referensi perpustakaan, laporan lembaga terkait, dan juga data-data sekunder yang ditulis oleh pengamat atau peneliti pada bidang bersangkutan.

### **1.9 Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian atau Bab. Bab pertama akan menjelaskan latar belakang, dan identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan penulisan pertanyaan penelitian beserta tujuan dan kegunaannya. Selanjutnya dipaparkan juga tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada bagian ini juga akan dijelaskan bagaimana metode dan sistematika penelitian.

Bab kedua menjelaskan fungsi, tugas, struktur dari JICA, dan bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh JICA. Bagian ini juga membahas mengenai program-program yang menjadi agenda ODA dalam memberikan bantuan di bidang lingkungan serta memaparkan mengenai pertimbangan dampak lingkungan dan sosial JICA.

Bab ketiga memaparkan diplomasi ekonomi Jepang ke Indonesia, bagaimana usaha-usaha Jepang dalam melakukan kerjasama ekonomi bilateral yang sesuai dengan kepentingan negaranya. Selanjutnya memberikan alasan atau

latar belakang Jepang dalam melakukan hubungan ekonomi dengan Indonesia, dan bagaimana keterlibatan dan perhatian Jepang dalam berbagai diplomasi lingkungan.

Bab keempat menganalisis relevansi upaya bantuan tata kelola lingkungan Jepang kepada Indonesia dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi, diplomasi bilateral, dan konsep bantuan luar negeri dalam bidang lingkungan. Dalam bab ini akan diketahui upaya-upaya yang dilakukan Jepang dalam melakukan diplomasi ekonomi dalam bentuk bantuan luar negeri ke Indonesia.

Bab lima adalah kesimpulan. Pada bagian ini akan dipaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan melihat koneksi antara teori dan data-data yang ditemukan terkait upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang ke Indonesia dalam bidang tata kelola lingkungan melalui JICA.